

PERAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN MANDAU TALAWANG KABUPATEN KAPUAS

Aquarini, Mujiono

Universitas Muhamadiyah Palangkaraya

ABSTRAK

Kewenangan yang dimiliki oleh seorang Camat tentunya punya pengaruh besar untuk kemajuan suatu Kecamatan dan kemajuan daerah wilayah yang dipimpinnya. Tidak kurang daripada itu kepuasan masyarakat dengan kepemimpinan seorang Camat juga berpengaruh. Oleh karena itu maka penulis ingin meneliti terkait peran Camat dalam kepuasan masyarakat yang ada diwilayahnya dengan segala kebijakan dan kewenangan yang dimiliki seorang camat. Adapun metode yang digunakan dalam adalah Tipe penelitian deskriptif penelitian deskriptif kualitatif ini mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif (perbandingan), serta dapat juga menjadi sebuah studi korelasional (hubungan) antara satu unsur dengan unsur lainnya.

Keyword : Camat; Kewenangan;

ABSTRACT

The authority possessed by a sub-district head certainly has a major influence on the progress of a sub-district and the progress of the area he leads. No less than that the community's satisfaction with the leadership of a Camat is also influential. Therefore, the author wants to examine the role of the Camat in the satisfaction of the people in his area with all the policies and authorities of a Camat. The method used in this type of research is descriptive qualitative descriptive research refers to quantitative studies, comparative studies (comparison), and can also be a correlational study (relationship) between one element and another.

Keyword : Camat; Authority;

PENDAHULUAN

Aspek administrasi negara yang muncul selama ini berkaitan dengan citra dan kinerja administrasi negara yang belum dapat memenuhi keinginan masyarakat banyak. Pemasalahan administrasi negara tersebut saling terkait dan mempengaruhi, mulai dari hubungan dan kewenangan antar lembaga negara, sistem pemerintahan, kelembagaan (institusi pemerintah dan institusi diluar pemerintah yang semakin bertambah seperti komisi-komisi dan badan atau dewan-dewan), pengelolaan keuangan negara, kinerja pelayanan publik yang masih buruk, hubungan kelembagaan antara pusat dan daerah, dan SDM aparatur yang kurang atau belum profesional.

Permasalahan yang pertama masih banyaknya pemerintah daerah yang memiliki persentase belanja operasional untuk kebutuhan internal pemerintah yang lebih besar dari belanja publik. Kondisi seperti ini sangat membatasi bagi pemerintah daerah untuk dapat

memberikan pelayanan yang baik kepada publik. Kedua, tingkat korupsi yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari adanya sejumlah kepala daerah yang ditangkap KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT). Ketiga, nefektivitas dan inefisiensi dalam pengelolaan pembangunan. Dikatakan, banyak perencanaan pembangunan dilakukan secara serampangan, *copy* dan *paste* dari tahun-tahun sebelumnya, dan tidak fokus pada outcome yang ingin dicapai. Keempat, kualitas ASN masih belum optimal dalam mendukung kinerja pemerintah. Kelima, organisasi pemerintah yang cenderung besar, baik di pusat maupun di daerah, yang cenderung memanfaatkan kemungkinan untuk memperbesar struktur tanpa melihat kebutuhan nyata, ketersediaan sumber daya yang dimiliki, kondisi terkini yang dihadapi, dan cakupan wilayah pelayanan melihat kebutuhan nyata, ketersediaan sumber daya yang dimiliki, kondisi terkini yang dihadapi, dan cakupan wilayah pelayanan. Keenam, lanjut dia, kualitas

pelayanan publik yang masih belum memenuhi harapan publik. pelayanan publik bisa dalam bentuk perizinan, pelayanan dasar, ataupun pelayanan jasa, menjadi tanda kehadiran pemerintah di masyarakat.

Kecamatan yang merupakan bentuk organisasi perangkat daerah Kabupaten atau Kota yang dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat sebagai pemimpin wilayah dalam sebuah kecamatan dimana sebagai pemberi kebijakan haruslah banyak pertimbangan yang diperhatikan agar hasilnya efektif dan mempunyai keadilan untuk setiap warga dikecamatan tersebut.

Dengan demikian persoalan yang sebenarnya sama antar desa bisa belajar dari desa lainnya untuk menyelesaikannya kurang berjalan optimal, belum semua desa perangkatnya bisa berkantor sebagaimana layaknya perangkat yang seharusnya mempunyai

jam kerja.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian deskriptif yakni akan menggambarkan peran camat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Arikunto (2005) menuliskan penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Adapun masalah yang dapat diteliti dan diselidiki oleh penelitian deskriptif kualitatif ini mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif (perbandingan), serta dapat juga menjadi sebuah studi korelasional (hubungan) antara satu unsur dengan unsur lainnya. Kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan pada akhirnya dirumuskan suatu kesimpulan yang mengacu pada analisis data.

Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan analisa kualitatif yaitu suatu cara peneliti yang menghasilkan data deskriptif analisa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun lisan. Analisa data diperlukan untuk menyempitkan dan membatasi penemuan yang ada sehingga data akan menjadi teratur, tersusun dan lebih berarti. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan di lapangan bersamaan dengan proses pengumpulan data, dengan proses induktif dan siklus. Pada waktu proses pengumpulan data sudah berakhir, semua informasi yang ada bukan sekedar data mentah tetapi sudah melewati proses analisis, guna menjawab perumusan masalah penelitian yang sudah ditetapkan, peneliti memilih pendekatan penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian. Konsekuensi dari pernyataan ini, dalam proses pengumpulan data, peneliti sudah harus berusaha memilih

dan mengelompokkan data berdasarkan variabel yang dikaji atau berdasarkan unit-unit yang diperlukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Mandau Talawang

1. Visi

Terwujudnya Kabupaten Kapuas yang lebih maju, sederhana dan Mandiri melalui Pembangunan yang dil dan merata serta berkelanjutan.

Terkait dengan visi misi tentunya menyesuaikan dengan visi Kabupaten Kapuas.

2. Misi

- Meningkatkan pelayan public Kecamatan Mandau talawang
- Mengoptimalkan penguatan kelembagaan antara lain: mengoptimalkan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
- Meningkatkan peran dan fungsi

Kepala Desa, Perangkat desa, RT/RW, Guru Agama, guru mengaji, guru sekolah minggu, Damang, mantir, Basir, Pemangku agama Hindu, Pendeta, Babinsa, Babinkatibmas serta meningkatkan Insentif untuk guru menengah, kaum masjid, Guru sekolah Minggu, Damang, Mantir, Kepala handel, Basir, Pemangku Agama Hindu, pendeta, Babinsa TNI dan Babinkantibmas Polri, RT, Kepala Desa, BPD Desa dan Petugas Pemadam Kebakaran dengan mengalokasikan anggaran pembangunan yang dikelola Kelurahan serta dengan alokasi dana desa (ADD).

A. Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 di tambahkan rambu-rambu kewenangan yang perlu didelegasikan oleh bupati/walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek: 1. Perizinan

2. Rekomendasi 3. Koordinasi 4. Pembinaan 5. Pengawasan 6. Fasilitasi 7. Penetapan 8. Penyelenggaraan 9. Kewenangan lain yang dilimpahkan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 mengatur secara lebih rinci mengenai Tugas dan wewenag camat baik untuk wewenag yang bersifat atributif maupun pedoman unujuk kewenangan yang bersifat delegatif. Untuk kewenangan delegatif disusun berdasarkan kriteria eksternalitas dan efesiensi. Berdasarkan Pasal tersebut maka Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan sebagai perpanjangan tangan Bupati untuk menangani urusan otonomi pemerintahan di kecamatan yang meliputi :

- (1) Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan ;
- (2) Camat sebagaimana dimaksud

juga menyelenggarakan tugas umum

Pemerintahan meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau

Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Camat dibantu oleh :

1. Sekretaris Camat;
2. Kepala Seksi Pemerintahan;
3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;
5. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu factor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi maupun bidang pemerintahan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan suatu organisasi pemerintahan yang pada hakekatnya SDM berupa manusia yang bekerja di perkantoran sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan pada organisasi

itu sendiri. Pegawai bukan hanya sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau asset bagi

institusi atau organisasi.

Berikut ini adalah pegawai yang ada di kecamatan Mandau Talawang

**DAFTAR URUT KEPANGKATAN PNS
KANTOR KECAMATAN MANDAU TALAWANG
TAHUN 2021**

N O	NAMA	NIP	PANGKAT /GOL	JABATAN (TMT)
1.	MUJIONO, S.Pd	19720810 199810 1 001	Pembina (IV/a)	Camat 13 Januari 2020
2.	HODMAN ANDERSON, S.Pd	19660620 199108 1 001	Pembina (IV/a)	Kasi Ketertiban dan Ketentraman Umum 23 Maret 2017
3.	MARLI, SE	19650209 198503 1 004	Penata TK. I (III/d)	Kasi Pembangunan dan Lingkungan Hidup 13 Januari 2020
4.	MUHAMMAD SYOFIAN, S.IP	19740803 200003 1 006	Penata (III/c)	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10 Agustus 2017
5.	SANDY SUARDY, SE	19740417 199902 1 001	Penata TK. I (III/d)	Bendahara 01 Juni 2019
6.	TAUFIKUL MOQOROBIN	19771212 200901 1 007	Penata Muda TK. I (III/b)	Pengelola Perangkat Kecamatan 01 Februari 2019
7.	SUYANTO, SST	19780628 200701 1 007	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi IMB Gedung atau Bangunan 01 Maret 2019
8.	SUYANTO	19690404 200604 1 013	Pengatur TK. I (II/d)	Pengadministrasi Kependudukan 01 Februari 2019
9.	GUSTANTURI	19760803 200604 016	Pengatur TK. I (II/d)	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Tahun 2011

10.	ALEN	19731015 200701 1 02	Pengatur TK. I (II/d)	Pengelola Kesejahteraan Sosial 01 Februari 2019
11.	ABDUL KARIM	19771120 200701 1 008	Pengatur (II/c)	Pengelola Keamanan dan Ketertiban 01 Oktober 2020

Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang tersedia saat ini di Kecamatan Mandau Talawang masih jauh dari cukup, untuk lebih lengkap dapat di lihat pada tabel berikut:

No	Uraian	satuan	Jumlah	Keterangan
1	Gedung kantor	1 Unit	1	Kondisinya kurang baik
2	Rumah Jabatan Camat	1 Unit	1	Kondisinya kurang baik
3	Komputer PC/ laptop	1	1	Kondisinya baik
4	Meja Kerja Eselon III dan IV	5	5	Kondisinya kurang baik
5	Kursi Kerja Eselon III dan IV	5	5	Kondisinya kurang baik
6	Laptop	2	2	Kondisinya baik
7	Almari Arsip	3	3	Kondisinya baik
8	Kursi tamu	1 Set	1 Set	Kondisinya kurang baik
9	Kursi Ruang Camat	1 Set	3	Kurang Baik
10	Papan Data	1	1	Kondisi baik
11	Papan Informasi	1	1	Kondisi baik
12	Papan Agenda	1	1	Kondisi baik
13	Kipas Angin	2	2	Kondisi baik
14	Filing Kabinet	1	1	Kondisi baik
15	Meja Rapat	3	3	Kondisinya kurang baik
16	Kursi Rapat	50 buah	50	Kondisinya kurang baik

1 7	Meja Sekcam dan Kasi	6 buah	6	Kondisinya kurang baik
1 8	Pengeras Suara/Sound	1 set	1	Kondisi kurang baik
1 9	Mesin Pemotong Rumput	1	1	Kondisi baik

Berdasarkan Hasil Penelitian Dari Peran Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Mandau Talawang Kabupaten Kapuas

3. Peran fasilitator

Peran utama fasilitator adalah menjadi pemandu proses, ia selalu mencoba proses yang terbuka, inklusif dan adil sehingga setiap individu berpartisipasi secara seimbang. Fasilitator juga menciptakan ruang aman dimana semua pihak bisa sungguh-sungguh berpartisipasi.

Pendamping mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan, mengkondisikan iklim kelompok yang harmonis, serta memfasilitasi terjadinya proses saling belajar dalam kelompok.

Berdasarkan wawancara dengan Asisten III Perwakilan

Bupati yaitu Bapak Idie Agam bahwa seorang camat merupakan kepanjangan tangan dari Bupati untuk melaksanakan pemerintahan diwilayah masing-masing demi tercapainya pemerataan dan tentunya terwujudnya visi dan misi Bupati dalam menyelesaikan tugasnya dimana kita ketahui tidak mungkin Bupati bekerja sendiri tanpa adanya kepanjangan tangan. Meskipun Bupati sebagai pemberi wewenang belum memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan karena tidak ada kejelasan mengenai teknis pelaksanaan serta adanya kewenangan yang belum dilimpahkan secara langsung

kepada Camat. Belum efektifnya implementasi kebijakan pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat di Kecamatan Mandau Talawang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain Faktor komunikasi, Peraturan Bupati belum sepenuhnya dikomunikasikan secara baik kepada Camat maupun instansi terkait, Faktor sumber daya, dimana Camat belum didukung dengan aparatur yang memadai, sumber pendanaan yang sesuai, sarana dan prasarana yang lengkap, serta informasi dan kewenangan yang jelas, Faktor disposisi, masih terdapat beberapa kewenangan yang sudah dilimpahkan oleh Bupati tetapi masih tetap belum diberikan sepenuhnya kepada Camat, dan Faktor struktur birokrasi, belum terdapat mekanisme koordinasi dan SOP (Standart Operational Procedure).

Didalam kepemimpinannya

seorang Camat tentunya harus memiliki inisiatif untuk mengatur penyelenggaraan urusan rumah tangganya. Seorang pemimpin (kecamatan) dalam mewujudkan hal tersebut harus memiliki kreatifitas yang tinggi dalam tata pemerintahan di daerah yang dipimpinnya. Suatu kebijakan tidak akan berdiri sendiri tentunya harus didukung oleh sumber Daya yang ada baik SDA nya maupun sumber daya manusianya juga ga terkalah penting adalah rencana kerja yang matang.

Hambatan dalam kepemimpinan Camat antara lain ada beberapa faktor yakni Isi kebijakan. Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia. Kemudian Informasi tentunya Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi. Serta dukungan dalam

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Yang terakhir Pembagian potensi terkait Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Berdasarkan Observasi Peneliti antara lain :

1. Setiap kepemimpinan camat

pada daerahnya tentu jharus menyesuaikan geografis wilayahnya.

2. Terwujudnya kepemimpinan yang baik dan tercapainya program kerja tentu atas dukungan dari segala pihak tertuma intern kecamatan itu sendiri apakah ingin adanya perubahan atau perkembangan di daerahnya.

3. Jabatan pemimpin kecamatan bias dikatakan jabatan strategis sehingga harus ada dasar hukumnya dalam bekerja sebagai kepanjangan tangan dari bupati seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 126 ayat 2 bahwa kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah. Selain itu ditambahkan pula Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Pada pasal 2 ayat 1 bahwa Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati.

4. Peran motivator

Peran motivator adalah peran untuk menyadarkan dan mendorong kelompok untuk mengenali potensi dan masalah, dan dapat mengembangkan potensinya untuk memecahkan permasalahan tersebut. Menurut george R. Terry, dalam dasar-dasar motivasi motivator yang biasanya memberikan hasil yang sangat memuaskan memiliki 10 ciri yaitu : 1 Melakukan perluasan dan perputaran pekerjaan 2 Meningkatkan partisipasi dan peran serta 3 Menerapkan manajemen

berdasarkan hasil 14 4 Melakukan sentuhan perilaku manajerial pada setiap tingkatan secara bertahap 5 Memiliki kemampuan berfikir yang kuat 6 Membangun hubungan antar manusia yang realistis 7 Melakukan akomodasi lingkungan kerja 8 Memiliki waktu kerja yang fleksibel 9 Bersedia menerima kritik secara efektif 10 Berusaha membangun sistem kerja yang solid

Berdasarkan wawancara dengan kepala Bappeda bapak Ahmad M. Saribi bahwa Bappeda dengan kecamatan mempunyai hubungan yang sangat erat dikarenakan adanya Koordinasi terkait dengan pembangunan untuk wilayah kecamatan itu sendiri. Koordinasi itu sendiri adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara unit-unit dibawahnya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama.

Sehingga munculah seimbang dan serempak dalam mencapai suatu tujuan tertentu serta mencegah terjadinya konflik, kekacauan, perpecahan, kekosongan dan sebagainya dalam suatu organisasi.

Adapun koordinasi dimaksudkan untuk menyasikan dan menyatukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pimpinan atau kelompok pejabat pelaksana. Bentuknya adalah koordinasi dalam perencanaan seperti Musrembang serta koordinasi dalam pelaksanaan koordinasi dinas daerah dengan camat, kemudian camat dengan kepala desa dan instansi terkait yang ada di wilayah camat tersebut bertugas.

Musrembang merupakan wahana untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu hendaknya dilaksanakan dengan tertib, lancar,

penuh kesungguhan sehingga menghasilkan usulan program kegiatan yang realistis dan berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga hendak masyarakat menyampaikan kehendak dan tentunya akan menjadi program kerja untuk camat itu sendiri

Musrembang Kecamatan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu penyelenggaraan Musrembang Kecamatan harus didasarkan pada asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asasa akuntabilitas.

Berdasarkan Observasi Peneliti diperoleh gambaran bahwa koordinasi pembangunan daerah di tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud sudah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang. No. 25 Tahun 2004 tersebut. koordinasi perencanaan telah berjalan dengan baik dengan pendekatan bottom-up yaitu mulai dari Musrembang Desa, kemudian Musrembang Kecamatan, dan terus ke Musrembang Kabupaten.

Pada Musrembang Desa ditetapkan usulan pembangunan jalan yang akan dibawa ke Musrembang Kecamatan. Pada Musrembang Kecamatan, Camat mengkoordinasikan dan mengintegrasikan usulan-usulan program pembangunan jalan dari semua desa di wilayahnya.

5. Peran katalisator

Katalisator adalah orang-orang yang menjadikan segalanya

terlaksana, karakteristik. Seorang katalisator antara lain : intuitif, komunikatif, bersemangat, berbakat, kreatif, menginisiatifkan, bertanggung jawab, murah hati dan berpengaruh. Seorang katalisator akan membantu anggota tim lain untuk saling mendukung dan memberi semangat. Dalam peran bidan ini dapat dengan melakukan aktivitas sebagai penghubung antara kelompok pendampingan dengan lembaga di luar kelompok maupun lembaga teknis lainnya, baik teknis pelayanan permodalan maupun pelayanan keterampilan berusaha dalam rangka pengembangan jaringan

Berdasarkan wawancara dengan bapak Kristian S Gani selaku kepala desa Sei Pinang bahwa Camat merupakan tonggak kepemimpinan dalam suatu kecamatan yang mana kepala desa sebagai kepanjangan tangan dalam system pemerintahan. Camat

menduduki Pemerintah Desa sebagai bawahan maka perlu dilakukan terobosan dengan memberikan kesadaran bahwa kedudukan pemerintah desa sebagai anak buah Camat hanya relevan kalau dilihat dari kaca mata birokrasi. Namun setelah adanya perubahan maka sistemnya camat sebagai pengawas dari kinerja kepala desa.

Dalam membantu kepemimpinan camat, kepala desa dalam kepemimpinannya memiliki program kerja yang menyesuaikan keinginan masyarakat setempat untuk menjadi lebih baik terutama terkait lapangan pekerjaan dan kemudian kami melakukan pelaporan kepada camat untuk kemudian camat yang melakukan pengawasan. Kami juga menyampaikan kemajuan jika ada kendala atau hambatan kami pun menyampaikan. Jika ada hal darurat kami pun menyampaikan

kepada camat sehingga masyarakat tidak merasa terabaikan.

Berdasarkan Wawancara dengan bapak Konyong M. Buhek selaku kepala desa Tumbang Tihis Camat adalah sebagai atasan Kepala Desa dimana Camat mempunyai wewenang dalam mengatur Kepala Desa dan Pemerintahan Desa karena pada saat pemerintahan itu yang bersifat hirarki dan sentralistik yang membuat Kepala Desa bawahan Camat. Sejak adanya perubahan Undang-undang tersebut hubungan Kepala Desa dengan Camat hanya sebatas memberitahu dan melakukan kerjasama antara Kepala Desa dengan Camat. Posisi Camat dalam Undang-undang sangat mengambang dan Camat tidak mempunyai wewenang dan intervensi dalam mengatur Kepala Desa maupun Pemerintahan Desa

Tugas dan fungsi camat

dalam berhubungan dengan Desa seperti : melakukan pengawasan terhadap Desa, melakukan pembinaan dalam Desa, memfasilitasi kegiatan Desa dan melakukan koordinasi atau melakukan rapat koordinasi dengan dengan Desa.

Program camat adalah merupakan program kepala desa karena tugas kepala desa bersifat membantu kepemimpinan camat namun tentunya kades akan meberikan saran apa saja yang diperlukan masyarakat desa. Kepala desa juga akan memberikan pandangan terkait dengan perkembangan modern sehingga camat pun diharapkan dapat membawa masyarakat desa menuju kemajuan jaman walaupun kami diwilayah ujung kabupaten Kapuas.

Berdasarkan Observasi Peneliti Dalam melakukan koordinasi Camat ke Desa seperti:

- a. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di Desa.
- c. Mengkoordinasi penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Dalam melakukan kerjasama antara Camat dan Desa dalam kerjasama ini harus melalui rapat koordinasi yang dilakukan 1 kali dalam sebulan seperti :

- a. Kerjasama dalam pembangunan.
- b. Kerjasama dalam kemasyarakatan.
- c. Kerjasama dalam Pemerintahan.
- d. Kerjasama dalam ketertiban di lingkungan Desa.

Dalam Undang-undang tersebut hubungan kerjasama antara Kepala Desa dengan Camat yang menempatkan Camat sebagai pemimpin di Desa dan sebagai pembina di Desa hal ini membuat

Camat mempunyai kekuasaan yang kuat dalam mengatur Desa maupun perangkat-perangkat Desa. Kepala Desa dan sekretaris Desa akan dikendalikan melalui pembinaan dan pengawasan tersebut.

Seorang pemimpin suatu desa maupun kecamatan hendaknya mempunyai hal-hal inovasi, antara lain :

1. Pemimpin harus lebih meningkatkan lagi pemberian motivasi kepada seluruh para pegawainya, dengan selalu menjaga komunikasi dan bersikap terbuka dalam memberikan arahan yang disertai pengawasan.
2. Peranan pemimpin dan motivasi kerja sebaiknya harus sama-sama sejalan, agar prestasi pegawai lebih meningkat. Untuk para pegawai juga berusaha memberikan hasil pekerjaan yang bermutu, teliti, selalu

bekerja sama, tetap solid bukan bekerja secara sendiri-sendiri. Dan tidak menunda-nunda pekerjaan yang telah ada.

3. Seorang pemimpin hendaklah piawai dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi yang baik akan mampu meningkatkan motivasi serta mampu meningkatkan komunikasi yang efektif dan dapat memberikan pemahaman yang baik bagi para pegawai.
4. Pimpinan harus lebih bijaksana dan tegas dalam mengambil setiap keputusan,

karena keputusan tersebut dapat mempengaruhi kinerja pegawai dan perkembangan kantor tersebut.

5. Pemimpin juga sebaiknya mempertimbangkan setiap keputusan dan lebih sering mendengarkan apapun pendapat dari para pegawai, sehingga dapat menjadi saran yang baik untuk meningkatkan keefektivitasan kinerja pegawai.